



PENETAPAN

Nomor 529/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ruslan bin Kaco Ulu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, sebagai Pemohon I;

Ma'rufi bin Ruslan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Nasriah binti Ruslan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III;

Liko bin Ruslan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV;

Herman bin Ruslan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon V;

Saharuddin bin Ruslan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Ilmu Pelayaran, bertempat di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon VI;

Ramlia binti Ruslan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon VII;

Hal. 1 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Hanisa binti Ruslan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon VIII;

Susan binti Ruslan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini Pemohon III (Nasriah binti Ruslan) bertindak atas nama diri sendiri dan penerima kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 76/SK/XII/2014/PA Pwl. tanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 529/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 16 Desember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-12122014-0001 tertanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit dan almarhumah tetap beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki bernama Ruslan bin Kaco Ulu dan telah dikaruniai delapan orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Ma'rufi bin Ruslan (Pemohon II);
 - 2.2. Nasriah binti Ruslan (Pemohon III);

Hal. 2 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA Pwl



- 2.3. Liko bin Ruslan (Pemohon IV);
- 2.4. Herman bin Ruslan (Pemohon V);
- 2.5. Saharuddin bin Ruslan (Pemohon VI);
- 2.6. Ramlia binti Ruslan (Pemohon VII);
- 2.7. Hanisa binti Ruslan (Pemohon VIII);
- 2.8. Susan binti Ruslan (Pemohon IX);
3. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi meninggalkan seorang suami dan delapan orang anak kandung, masing-masing tersebut di atas;
4. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi semasa hidupnya mempunyai tabungan di BNI Cabang Pembantu Wonomulyo dengan Nomor Rekening 0163643683;
5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Wonomulyo dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi pada tanggal 18 Nopember 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan kuasa para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli silsilah keturunan Ruslan bin Kaco Ulu dan Almarhumah Nanna alias Mardiana, tertanggal 12 Desember 2014, yang diketahui Kepala Desa Laliko, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardiana Nomor 7604-KM-12122014-0001, tertanggal 12 Desember 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi rekening Bank BNI Cabang Mamuju (Cabang Wonomulyo) atas nama Nanna No Rekening 0183643683, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, kuasa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Muh. Said bin Ibrahim**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Capalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon II sampai dengan IX anak dari Nanna alias Mardiana dengan lelaki Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon III delapan bersaudara yaitu Ma'rufi bin Ruslan, Nasriah binti Ruslan (Pemohon), Liko bin Ruslan, Herman bin Ruslan, Saharuddin bin Ruslan, Ramlia binti Ruslan, Hanisa binti Ruslan dan Susan binti Ruslan;
- Bahwa saksi bisa kenal para Pemohon karena Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah keponakan saya (saksi bersaudara kandung dengan almarhumah Nanna alias Mardiana);
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon I karena dia adalah ipar saksi namanya Ruslan bin Kaco Ulu;
- Bahwa semasa hidup Nanna alias Mardiana hanya sekali menikah dengan Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I);

Hal. 4 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I) tidak mempunyai istri lain selain almarhumah Nanna alias Mardiana dan hanya sekali menikah dengan almarhumah Nanna alias Mardiana, tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa Almarhumah Nanna alias Mardiana meninggal dunia pada tanggal 18 November 2014 karena sakit dan tidak ada kesengajaan yang menyebabkan almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami dan anak-anak almarhumah Nanna alias Mardiana memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama karena semasa hidupnya almarhumah Nanna alias Mardiana mempunyai tabungan pada BNI Cabang Pembantu Wonomulyo, dan para Pemohon bermaksud menarik kembali tabungan tersebut.

Saksi kedua, **Syarifuddin bin Fattah**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah sepupu satu kali saksi (ibu Pemohon bersaudara dengan Ibu saksi);
- Bahwa saksi kenal ibu para Pemohon II sampai dengan Pemohon IX bernama Nanna alias Mardiana dan ayah Pemohon bernama Ruslan bin Kaco Ulu;
- Bahwa ibu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX sudah meninggal dunia, sedangkan ayah Pemohon II sampai dengan Pemohon IX sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa ibu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX meninggal dunia pada tanggal 18 November 2014 dan meninggal dunia karena sakit dan bukan karena unsur kesengajaan;
- Bahwa saat almarhumah Nanna alias Mardiana meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, begitupun suami dan anak-anak yang masih hidup menganut agama Islam;

Hal. 5 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Nanna alias Mardiana cuma sekali menikah dengan Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I);
- Bahwa ibu dan ayah almarhumah Nanna alias Mardiana sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Nanna alias Mardiana mempunyai tabungan yang tersimpan pada Bank BNI Cabang Pembantu Wonomulyo;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon yang lain mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama karena para Pemohon menginginkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Nanna alias Mardiana, kemudian para Pemohon bermaksud menarik kembali uang almarhumah Nanna alias Mardiana yang tersimpan pada Bank tersebut diatas.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi, selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Wonomulyo dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Hal. 6 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan silsilah Keturunan Ruslan bin Kaco Ulu dan almarhumah Nanna alias Mardiana yang menunjukkan bahwa Pemohon I dengan almarhumah Nanna alias Mardiana memiliki hubungan suami istri, serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dengan almarhumah sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian diperoleh keterangan bahwa Nanna alias Mardiana telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nanna alias Mardiana diperoleh keterangan bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana semasa hidupnya telah memiliki tabungan atau simpanan pada Bank BNI Cabang Mamuju (Cabang Pembantu Wonomulyo);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon melalui kuasanya telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan kuasa para Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nanna alias Mardiana telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2014 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana meninggalkan ahli waris yaitu suami (Pemohon I) yang bernama Ruslan bin Kaco Ulu dan delapan orang anak orang anak kandung (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX);
- Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana saat meninggal dunia memeluk agama Islama, begitupun suami dan anak-anaknya yang masih hidup menganut agama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli almarhumah Nanna alias Mardiana selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor Bank BNI Cabang Mamuju (Cabang Pembantu Wonomulyo);

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris yakni suami (Pemohon I) dan delapan orang anak kandung (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX);
- Bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ditemukan halangan dan larangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah sebagai administrasi untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor Bank BNI Cabang Mamuju (Cabang Pembantu Wonomulyo);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, Majelis dapat menetapkan kematian yang pasti terhadap Nanna alias Mardiana yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2014 yang kemudian almarhumah Nanna alias Mardiana dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Hal. 8 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَ الَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa63c81246ea195b0704707a1008ef5f841fb4e7ec5fe38fd9661d2ef3c4773a66a3a56a4de5c17ba7cf9cc8064a14601f818e7047239afb67fe0907f1c67d6fc2fe23f861a95cb4b26907fb534c123b31581d82cb1ae4e02ab9560063995cd007e8d514514005145140051451400514514005731f13be20e97f0abe1febfe2ed6a65874dd22d24ba977385de547ca8a4ff1336d503b9602ba7af997fe0a15f083c73f1abf67cb9d07c09b2e2fa3bd8aeeeb4e32796f790206ca213c160c55b69233b4e0e70ac01f9e1f01bc4be09fda7bf690d5bc73fb40f8cb4fb3d3e36f32d348d4269228ee5b27644a47cb1c5181920b824ed00302d8fb27f6f2f8adf07fc4bfb23f893c39a0f8cbc2d73751a5b1d2b4dd2af6190ab4732611238c9db840c07000afc9bf137c24f1b7833517b0d73c27ac69776a7062b9b2910e7f115f4cfecd3ff04dff001e7c5fd36f7c41e27b1b9f0a6851dac8f6715ec663b9bd9bcb2630b1b6088c92b9738073c6706803ee8ff825578b9fc49fb285958c846744d52eac147fb24acc0fe731fcabec3afc9cff0082527c7ad0be17f897c6de03f166b16da25bea1b2f2cee3509c436eb3c5b92542cd80acca548ce33e5e3ae01fd1f9bf68df8516f2f952fc4df07c72ff71f5eb507f2f32803d12a8d86b7a76ab737b6f657f6d79716527937514132bb5bc980db1c03956c10707070457c4bfb5eff00c14bfc25f0d740bdf0ff00c31d4edfc51e339d7cb5d4ad0acd63a7e472fbc82b33f4c2ae579258f1b5bc3ffe0965fb4be8be18f127c40d13c7be288ac6efc41345aac3a8eb578b1c72ce3789b7cb230cbbbe43c9e769a00fd58a2bcf0fed15f0a966684fc4bf08095465a33aedaee03af237d7c8dfb65ffc14bfc35e0bd02fbc2bf0ab5487c43e27ba47825d6ad189b5d3c1182d1be312c9cf054951d7248c5007ddba56bda6ebad7a34ebfb6be36570d69722de557f266500b46f83f2b00c32a7919157ebf2ebfe094dfb4af86fc29a578cfc1be33f135968b3dddf26ad6336ab70b0a4eec9b271e6390bbbe488804e4e4e3a57e809fda37e1409244ff859be0fdf1e4baff6edae571d723cce2803d13a552d235bd3b5fb56b9d32fedb51b6591e1335a4cb2a07462aeb95246410411d4118afce8fd

Hal. 9 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b6ff00e0a63a55be877de08f83fa9bdeea7721e0bef145bfcb15bc641564b624659cf
3fbd180b8054b1395b3ff0004affda4fc21a27c21d5fc13e2af13e9fa1ea761a9c9796c
756bc8edd2582555e10bb0dc4387247fb42803f46ebf33be3af84a7d1ffe0ac5f0eefe
02c1b591657a76ff007523785bf0db09afb5bc49fb5b7c19f0ae9b3df5efc4df0c49140
0978ecb538aea5fa08e22cc4fe15f157c19f8bf1fed93ff000516d23c67a369b25a786
7c25a34f1c26e47ef5e21e62a48c0640264b8071d80c649a00fd30afc7dfdb41dbc05
ff000529d1b5f947970bdf68da82b74f9544484fe71b57ec157e49ff00c160b44bbd27
e39f823c4490325adc68a2149c0e1a686e246619f50b247f9d007eb5a9c80696be7d
f80dfb6afc32f8bdf0eb49d66ebc5da2f87f5a6855350d2b54be8ad6582703e70aaec
37213cab0cf0467072077f0fed15f0a6e6568e2f899e109645ea89aeda923f0f32803
d0e8ae0ffe17dfc33ffa287e15ff00c1d5b7ff001747fc2fbf867ff450fc2bff0083ab6ffe2e
803bca2b83ff0085f7f0cffe8a1f857ff0756dff00c5d46ffb41fc2e8a448dfe2478492493
ee2b6b76c0b7d06fe6803c3bfe0a6ff0fbc41e3ffd973521e1ff003646d22f22d56f6da
227335ac68fe6703aeddcafe98427b57ce9ff000463d5e459fe27697b898996cae769
3c060655e3eb9fd057d9bf133f6c7f82df0efc3f7575ab78f343d4818dc0b0d32e92fa6
9cedfb9b222d8cf4cb6073c9af98bfe0941a459ea7abfc64f18e91a54ba4f86f51d563
834b82462c238c34b218f71ea515e21f8d007e86514557d412e24b0b94b4758ee9a
36113b8caabe3e527db38a00fc9fff0082907ed127e2a7c71b2f84367e248744f05e9
175141abdf166687ed44fe5e4d992c21076edc12195f1d715f62fecede26fd997e06f
8121d3bc15e37f08daab4286f3509f52892eef5c2f2f2176dfc9c9d83e552c400335f9
49f1ebf65bf8bbf0d7c6baecbe28f0bea77ead77248dad594125c5a5d6e62de624a1
79c839c1c119c300722b27e0afecaff00127e3b788adf4cf0e786af96d9a4d93ea977
03c5696c3a92f2118040c9c753d0024d007d55fb0e78c745d0bfe0a2de32b0f0e5cc
37de1ef10c9aadb58dcdb9cc6f0890dc2153e988abf5aabbf127e22fc38ff00877e7ed7
de02992fee353d2ec16cb5292f56311bdd42c4c77384dc719c4a00cfa57eb7c1fb48
7c299f4e82fbfe16478561b69d16446b8d62de23861919567054fb1008ef400ffda1fc
17ab7c45f81be39f0d685712db6b1a9693716f6ad13842f214388cb12000ff0070e4e
30c735f929ff04c6bbd53c25fb66695a2ce93594d756b7f637b6d2a95605217936b03
d0878875f4afd59d7bf6acf839e1cd1e6d4ef3e26f859ed6252c7ec9aac3712301fdd4
8d9998fb006be1bfd99f5af0cfc7cff8296f893e207816ca4b4f0dd8584f76f23c3e59b8
95a216ef36dedbde466e793d480490003f4ea8a28a00f1afdb27c38be2afd96fe26d8
30ce3449ee47b18479a0fe718af913fe08c9ab3cde11f899a616fdddbded95c28f774

Hal. 10 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954ffe8b15f7e7c4bf0f378b7e1cf8a74341b9b53d2eeacc0f53244c9fd6bf1f3fe09b7f
b4668dfb3cfc64d6b47f16deae9be1ff001044b692de49c476f731b9f2ddcf65f99d49e
db813800d007ed3d15e78ff00b457c298a1499fe25f841227fbaedaeda807f1df5e7ff
18bf6edf83df07fc3475393c5ba7f8a2ea407ecfa6f876ee2bc9a53ee55b6a0e472c47
1d01a00f72bcf11695a76afa7e9575a8dadbea7a8890d9d94b32acd722300c86342
72db4104e071919eb5a35f885a17edbdac78c3f6d3f0a7c57f154e74ed12caf85aa59
2932c7a769f2068dd4614162164662719639e3b57ebb27ed25f099ad60b83f133c2
31c332ee8da5d6ed9323e85c1cfb76a00f47a2b831f1f3e191191f113c2a47fd86adb
f8ba3fe17dfc33ff00a287e15ffc1d5b7ff17401de515c1ffc2bf867ff450fc2bff0083ab6f
fe2e83f1f3e192824fc44f0a803a93ad5b7ff17401ddd7e0b7ed51e0ef147c1ffdafbc4
326a8f751df4bae9d5b4fbf958969e179b7c5286ee718071d0820f20d7ed3b7ed17f0
a96dbed1ff000b2fc2260ff9e835cb62a7f1df5f9d9fb7b7c62f873fb527c53f85de0ff87
53a7887c4b16a82d66d6ada22b08496455102b100c9861bf201519e092cd800fd52
b793cd8237fef283fa5494d8d4246aa060000629d401e1dfb6ef85dbc5ff00b28fc4bd
397ef2e94d763fed832cdffb4ebe52ff0082326ad24de0ef899a693fbbb7beb39d47bc
91caa7ff00458afbafe34e9ebab7c1ef1cd93f2973a15f427e8d038feb5f0d7fc11a7c3
97567e07f891adc9195b3bed42d6d61723866852467ff00d1cb401fa314514500733
f12fe20695f0afc03af78b75b97cad3348b47ba9b04066c0e1173c6e66c28f722be70f
d80bf6c4bdfda8741f145a788d6de0f136937cf3aa5b462347b29598c400c924c7cc6
4f701092cc589f52fdaffe175ffc63fd9c7c6fe16d28b1d52e6cc4d6b1af596489d6511
81dcbecda33c65857e547fc131fc6175e0afdae744d39e536f06b16f75a65d4678dc7
cb2e8bfff007f234a00fdbaaafc8bff82b8e9e34cfda4fc19a984d8971a1c25a4f564b997
3f902b5fae95f999ff059bf0e39b7f865af240cc8ad7b672cc178527ca74527df0f8fa1a
00fd26d13504d5b46b0bd8c831dcc11cca474c32823f9d5daf91ff631fdb43e1ef8f8e
09f8774ed77c4fa5f86fc4ba1d941a75e5a6af7d1db998c6811668d9d86f0c17271c8
6cf18da5bdd53f68af852f70605f899e1069c120c635db52dc75e3cca00f43a2b83ff8
5f7f0cff00e8a1f857ff000756dff5d1ff0befe19ff00d143f0affe0eadbff8ba00ef28ae0ff
e17dfc33ffa287e15ff00c1d5b7ff001751cbfb41fc2e83679bf123c251ef3b5776b76c3
71f41f3f5a00f91fe3e7fc13d3c6dfb53fc6ed7bc5de2ff001c597877444c5968b65656
ef7b2476a9f7370668c216259c804fcce7b62bcbbc69ff000468d52d74c697c29f11a
d751bf078b7d574f6b68d877f9d1e439ff80fe35f7eeb3fb4dfc24d02d25b9bdf895e15
8e38d77304d5e091f1ecaac58fe02be6cf8b9ff0565f853e0a8cc1e0fb5bff001e5fe01

Hal. 11 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0f0a359da8eb90649177e471d23239eb401f98bf19bf65af89bf012f0c7e30f0bddd9d
a16db1ea300f3ad25eb8db2ae573c670704719033557e13fed2ff0013be084aa7c1b
e31d4b49b60c5cd8f99e6dab310065a07ca138039233c57d5717ed13fb557edc97b
77a3f816c8e85e1d2365c9d2505adb46a49044b7521dc490dca2b7cc07095de781ff
00e08e1797a8b77e3af88a91ddbbee9adb45b432823febb48579ff008053bf715bb1
c4f80ffe0b0df10f461043e2af09e89e2385170f35ab3d9cf21f527e74fc9057a9d87fc1
673c3f20ff004df865a8db9ffa61aa472ff38d6bac83fe090df082f2c83dbf8a3c4d3139
0268eeadd90907078117a8f5ae7f52ff008234f83e6909b1f887acdb27659eca2948f
c415a5a0f53e84fd933f6ceb0fdacef3c40ba4784b51d0ecf46488cd7779711bab3c8
4ed40179c90ac73d38f715f47d78a7eca1fb2fe93fb2afc3fbdf0d69baa49adcb797cd
7b3ea13dbac2ee4aaaaa6013c285e39eac6bdae800afc89ff8288fed06bf1a3f681b2f
8551789a3d0fc05a1de456da85f92cd07da4e04d33aa8cb79418a01cf2ad8fbc6bf5b
35582e6eb4cbb86cee459de490ba4372d189044e410afb491bb070719e715fcff007
c68fd967e2cfc2af136a6be28f09ea932fda198eab6b03dc5adc6e39deb2a820e7392
0f2338201e2803f5d7e0378e7f66af82ff000f6d745f0478e7c2563a7a44ad35d4fa9c
097778c07fac98b15677393db8ce000302be2dff008279f8a342f0cfede3e39d1b41b
c4bed075a8b51b6d32e2127cb9634984d1b0ff8046719f5af963e06feca1f123e3f78
960d2fc3da05d41685c2dceab7d13c5696ab9e59dc8ec32768cb1c1c035ec3e2bf06
43ff0004fcdb6bc1863bbbbb9d0b4e5b2b99b509631e65d5bcb1f9578ea83803719c
2ae4e000327a900fdaea2bceffe1a33e152dac572ff00127c270c3280cad36b56c99c
8c8e0b8c1f6ae1be2cfedcbf06fe14785a6d5a4f1b693e22ba28df65d3741bc8ef26b8
70385fdd96080ff79c81f53c5007b75eebda6e9ba969fa7dd5fdb5b5f6a0ceb696d2ca
ab25c145dce1149cb61464e3a0abf5f88569fb736bde3cfd2b7c1bf14fc5330d2b42d
2ef92da2d3e0cbc761a7bee4940e32efb647666c649e9801547ebac7fb49fc2692d2
0b93f133c231c33a868da5d6ed9323e85c1cfb76a00f48a2b831f1f3e191008f889e1
520f7fedab6ffe2e8ff85f7f0cff00e8a1f857ff000756dfc5d0077945707ff000befe19ffd
143f0aff00e0eadbff008ba0fc7cf8640127e22785401ff51ab6ff00e2e803bcaaba9ea
767a269b75a86a1750d8d85a44d3dc5d5cc8238a18d41667763c2a800924f000af3
dd4bf69af849a569336a53fc4bf0a9b3894b33c3abc1292075daa8c4b1f6009afcc4fd
bbbfe0a187e3a58cfe05f012dd69fe0d128379a84ac639752db9c2ed07e58b3ce0e4
b6d5242e31401fb01657b6fa959c177693c7736b3c6b2c53c2c1924461956523820
820822a7af937f62bfdab7e1f788bf66cf06dbeb7e34d0b44d6f44b04d2ef6cb52bf8e

Hal. 12 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da48fc80111b1215cab4611b70c8c92339040f71b7fda17e165da1783e24f8466507
05a3d72d9867f07a00f41a2b83ff85f7f0cff00e8a1f857ff000756dfc5d1ff0befe19ff00
d143f0affe0eadbff8ba00ef2aa6ad7525969579710c66696285e448c7f190a481f8d7
1dff000befe19ffd143f0aff00e0eadbff008ba825fda23e1542ed1c9f12fc228eabb995
b5cb5040f5c6fa00fc09d0be297897c07f1723f1d699a8cf17896cf526be1752316692
4de4b093fbc1b24303c10483d6bf633f65cff8283fc3ef8ebe1db4b6d7b56b2f0878ca
240b75a7ea33ac30cec3037c12360306c83b09dc3246081b8fe6bfededa77c1b4f8b
d3ea7f0935f1a9adf932eab656b197b3b7b8cfcc0cc4fcc1bef15008049c360ed5f99
064918ce7da9ee2d8fe89fc67fb497c2cf87d6535cebfe3ff0fd8ac2bb9a2fb7c724c47
fb31212edf8035f1afc6dff0082bef86f44fb4587c32f0ecbe21ba5255755d60182d410
7aac40ef7047a943ed5f0d7c0efd89be2dfc7e9209f43f0e4d61a2c84675ad5f36f6a1
724165246e9304721031afd0ef817ff049ef879e0416fa878f6f66f1ceaca031b4e6de
c11b038daa77c9820e096008eab48676ff00f04f1f887f113e35f803c43f117c7faccd7
adaadff00d934db158561b6b7821072f122803e6690a963927ca192715f59d67e83e
1fd33c2da4dbe97a369d6ba569b6ebb21b4b285628a31e8aaa0015a1401f94dff000
520f15789bf68afda4341f82be08b76d567d22327ec513aa096ede3f31c97240c2c61
47cdf770c73c9af83bc61e0ef12fc20f1cdd687afd85c685e23d2275f32097e578dc61
95811c104618303820820906bd4be38f8e3c63f09ff6c3f1d789b4ebe9f46f1558f88a
f2686e9072bba460301810c8c87182082a71d2bcafc7de3ef127c57f15ea3e27f13ea
571adeb57643dc5dcdc9c0c0030061540c00060018029a133fa05fd9cfe259f8c3f03
bc17e30770f71a9e9d1bdcb28c033afc92e0761e62bf15e8f5f2b7fc1326fe5bdfd8ff0
0c2692640b69eee14cff77cf76fe6c6bea9a43337c49a3c5e21f0f6a9a5dc00d05eda
cb6d203d0aba153fa1afc98ff8249ce347fda6fc5da7b654c9a25c4010f5cadc447ff65
35faf04641afcc1fd807c1bf63fddb7e32c9040cb63a41d462570bf2ab35eaaaae7b12
03103fd93401fa7f45145007947ed45f1bed7f67bf823e23f194c637bdb787c8d3e07
c7efaae4f9625c123201f9881ced46af3bff00827e7ed1b2fed0bf02ad65d5ae3cff001
4e82e34ed499dcb3cc00cc53b6493975e09272591cf7aa9ff000524f8457ff167f661d
63fb2b73dff0087e65d6c40bff2da3895c4abc90384667f5f9303ad7c5fff00047cf1c4d
a47c6bf147861a62b69ac691f6810f669a19176b7e09249f9d007eae8d3418fc55e0
fd7345980316a3633da383dc491b29fe75f949ff0004869ce9bfb4578d34f2df23e852
ae0f764b9871fa66bf5cd8654fd2bf2fbfe09bfe0c934dfdb43e31cb0dbb0d37498ef6d
04b8f955daf5762e7d4aa3fe5401fa854c965482279246548d01666638000ea49a7d

Hal. 13 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7c79ff0540f8e373f09ff0067d6d134b9cdbeade2d99b4d0ea7056d42e6e307dc154f
a39f6a00f8f7f6a1ff008298fc41d6fe2bdd5bfc34d7bfe11ff09e9173b2d1a1b7467bd6
5e19e52c183296dd85fbbb71904f35fa13fb17fed3507ed41f07edf5e9a28ed3c43a7
c82c356b54901fdf8453e6aa8e5524c9201e986193b49af82ff00678f869fb2b7c64fd
9e1742d6f5cb0f08fc5016ede7eababdeb5b3c33646d78f7bac5221eeb92796e9f2e1
9ff04b8f1c59fc20f8e7f107c37e24f11699a4e90da7b2bdc5cdf4496d2dc433aaa149
0b6d6cabcb84104e41c8e2803f5ce8af3b8bf68df8513cde547f137c1f24bcfc8baf5a9
6e3af1e6558ff85f7f0cff00e8a1f857ff000756dff5d0077945707ff000befe19ffd143f0
aff00e0eadbff008ba3fe17dfc33ffa287e15ff00c1d5b7ff0017401de57c99ff000539f8
7de20f1ffecb9a8ffc23fe74ada3de47aa5f5b444e65b58d1c49903aeddc9e98427b5
7b9bfded07f0ba291237f891e124924fb8adaddb02df41bf9ae43e26fed91f057e1d787
aeaeef57f1de89a9af96e069fa55cc77d3ce42ffab11c64e0b74f9f6af3c902803e34ff00
8231eaf2ac9f13b4b249858595c05278561e6a9c0f7c8fc857e9d57e797fc127747b5
d4b51f8c5e30d2b4a9349f0eea3aac506990331711c60cb218b71fbc515e219f7afd0
da00f09fdb63e3837c01fd9e7c45e21b49961d6ae42e9da61619ff004897232383ca
a091c678ca0cd7e26789fe007c42f0e7c32d27e24eada04f1784b5a7cdb6a9e62387
2c4e0b28259371071b80cf6afd17ff0082ca41acbf39f87d2db2ca7424d4ae05e32fd
c1318d7c9ddf809b1f8d7e726aff00b40fc41d77e16e9bf0e6f7c4d772f8334f39834b1
b553ef6e018819701b9018903b629a133ee4ff8239fc55ba8b5ff0019fc3bb8959ec6
6b75d66d159fe58e45658e50a3d583a13ff5cebf526bf11bfe09777773a77ed87e1eb
71be2175637b14a84632bf676719fc554d7edcd21857e4b7fc161344974df8dbe05d
7953115ce8de406c7578a7763fa48b5fad35f9b3ff0594d34ded9fc24318fdebdd5fc0
0faee16f8a00fd02f86bac7fc243f0ebc2daa13937ba5dadce7fdf895bfad7495cdfc36
d01fc2bf0efc2fa2c9c49a76976b66df58e2543fcaba4a002be3ff00dbe3f6d4bafd981f
c21a3f8752deebc45a8dd25f5e433aee55d3d1f0cbec65605430e4047e84a91f6057
e51ffc160fe13ea763e3bf0c7c4389249745beb41a5ccff332c37285d941eca190f03b
947a00fd43f0678b34ff001e784746f11e95234ba6ead6915edbb30c379722065c8e
c70791d8d6cd7c7fff0004aff1bcfe2dfd952c6c6e5b73e85a95c69d1e4e4f97f2cabf8
7ef48fc2bec0a002b9ef187c3ef0d78fe3d3d3c47a2596b2ba7dd477b69f6b8439826
460caea4f439033d88e0e41c57435e39fb57fed0f67fb337c20bef17cd0c5797fe7c56
b616329205cccdcae4720040ed9ff0067de803d8fa57e757fc15dfe2978bb48f09f87
fc13a569fa85af85f53ff4ad57568e26105c32b1f2adb78e382a64653d7f767b73f577

Hal. 14 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c2efdb03e13fc55f0643e21b1f19e91a5c7b035cd9eaf7b15adc5ab719122bb0c0c90
370ca9ec699f113f69ef81161e15bd1e27f1ef84b56d1a55f2ae2c92ea2d47cd53fc26
08f7961ff000122803f9f9a2bd7bf68ad67e1df8ffe2fdc1f839e15bed1340b864860b4
964691aea72705e38b931a924009b9bd7e5ced5e1b52f0ade7c3af1ba691e37d035
1b296ce68cdf95366d2e4c670c429653b09539562a4720e08aab9363eaeff824fea
1e2a83f69a8ed7477b83e1d9f4eb83adc6a331796109899b3d0f9be580473f311d09
afd9daf8fff0063cf8eff00b32e8ff0f60d3bc05aae97e0991541bbb3f10ce96b7d24878
2d249236252719f9188008e17a0f7c6fda37e1424fe4b7c4df07acd9c79675db5dd9f
4c7995251e8945707ff0befe19ff00d143f0affe0eadbff8ba3fe17dfc33ff00a287e15ffc
1d5b7ff17401de515c1ffc2fbf867ff450fc2bff0083ab6ffe2ea39bf683f85d6ca1a5f891
e128949da0beb76c013e9f7e803d02a8df6b9a7699796369797f6b69757ce62b582
79951ee1c2962b1a939620027033c026bc67e2bfed1f073e11787e4d4b50f1ae99
ac4fb4f93a7685731dedcccc067685462173eae557deb2af58fdb87c43f127f6b4f06
7c4ef11bb69ba1689a9402df4ab462c96965bf12819fbceace598f527030000003f7
22be65ff828b7c3af10fc49fd963c4967e1c96e3ed761245a94f676ed83776f112648c
f232003e663b98860138af50b7fda5be12dc58dbddffc2ccf08c50dc207432eb76c84
e467182fc1e791dab13c75fb61fc18f87fa3bdf9a9f11741b88f1f2c3a6de2decae71c0
090963cfa918a00f82ffe08d5e20b983e20fc42d081c5adc69905e32ffb71cbb07e92b
57eacd7e727fc12ef4ad23c4ff18fe3778fbc39a6cba4f862e6ec5ae976b247b4470c9
33ca138c8caaaa64027191eb5fa374005145140057caffb7e7ed6b75fb2ff0080b461
e1ff00225f16eb178a2da39d37a476f1b2b4ccc3fdaf9631d3efb1072b5f5457e67ffc1
623e116a37d6fe0ff008916892cf61671b68f7c01cac1b98c90be3fda2d2293eca3b8
a00fbf0efc4dd37e327c31f0e78d349e2cb58b45b80879313fdd9233ea55c3293fe
cd7655f077fc120fc78faf7c09f11786a69a59a4d0b562f1891b22386740caabe837a4
871eac6bef1a002b9bf1f7c38f0cfc52d07fb17c57a35b6b9a589a3b816f74b90b2236
e5604720f6e0f20b29c8241e92bccff0068ef8d363fb3ff00c1cf11f8d6f0c4f358c056c
ade5e97174df2c51e3209058827073b431ed401e96aa14000600e00a5af03f819fb6
bfc2ef8dbe0a8f5a8fc4da7787afe18f75fe97abdd25bcb6a4139e5c80ebd0ee52400c
3383c57790fed09f0b6e33e57c48f09498ebb35cb638ffc7e803d028ae0ff00e17dfc3
3ff00a287e15ffc1d5b7ff1747fc2fbf867ff00450fc2bff83ab6ff00e2e803bcacdf12ead2
e81e1dd535386c6e3549aced65b84b1b45dd35c3229611a0eecd8c01ea6b95ff008
5f7f0cffe8a1f857ff0756dff00c5d447f685f8582478cfc49f08891177329d72db2a3d48

Hal. 15 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dfd2803f02fe3978f3c53f12fe2af88fc43e325b8875fbbbbb733db5c2321b600ed5842
b72aa800503b05ae12bf52ff00e0a0df1f7f668f18f85f51b15b2b3f1dfc4258cc365a8
e86de5fd95f036b4b76a36ca801fb837e791f213b87e69e9fe01f126afe14d4fc4f65a
16a175e1dd32448af75386dddaded99c80a1dc0c2e490393dc7ad34c4cc14664756
4243839047506bfa04fd8beffc4fa97ecbbf0f2e7c60d3bebafa70def723123c21d840c
dea4c223393c9ce4f24d7e517ec27e38f80be0bf1aaddfc5cd1eedf538a61269daa4e
3ed1a743819ccb005ddb811c37ce0ee1955dbb8feb9fed15f093fb3219e0f891e10
8acb62842759b645518e060b8dbdb8a18236be30786b51f197c29f17e85a44ed6da
aea3a4dd5ada4aafb36caf132a7cdd86e2327d2bf1c7fe09e56faaf813f6e0f0ee8fa8c
3358dfc325f69f7b6b2828cae209432303cf0ca0e0f715fad5abfed4ff07744d2e6d42e
7e277851ada104b1b6d5e09df8f448d9998fb004d7c2df07fc5fe15fda2bfe0a7b1f8cf
e1fe9d28f0f69fa7cf3df5eba18fed72242d0fda021e50333c406704e3240662290cfd
3ca28a2803e7bfdbc7e2cc9f08bf66af135ed9cc61d5b570ba2d8b0383e6cf956208e
411189083d8815e85fb3efc3787e11fc16f07784a18c46da6e9d12cf839dd3b0df336
7de4673f8d7c55ff0590d7af34ef09fc30b3899bec936a375732a7f0b3c4916ccff00df
6d5f69fc01f8c9a27c79f853a0f8bf44ba8a64bb8156ea08df2d6b721479b0b8ea0a9f
50320ab0e181a00f44a28a280108c8c57e6a7ec7de094f851ff0520f8b3e19b3805b
587d96edede28feea4124d14d1afe01947e15fa0bf117e257867e13f856efc47e2cd6
2d745d26d94969ae640bbd8296d883abb90a70ab9271c0af873f60df11cdfb417ed6
bf18fe33456ad6ba24b6f1e9b6714ab87018a0889c71bbcb7f9802705fe9401fa154
5145007847edd1e1e7f147ec97f12eca31975d30dd01ff005c6449bfff69d7ccfff00046
bd78dd7c32f1fe8e4e4596ab05c81e9e6c447fed2afb7be32787a7f16fc22f1b6876a9
e6dd6a5a25ed9c49fde79207551f9915f927ff04cdfda5b42fd9ffe27788340f17dda69
5a0f89238e36bf957e4b6b984bf97bc8e8ac1dd7383825738193401fb3b5f8ff00ff00
057db7d4e3fda0bc3b773c3247627438e3b4b800ed6c4d21600f4c8663c75e47a8af
d3d97f68af85504492c9f12fc211c6ff0075df5db500fd0efaf3af8e9e26fd9bfe32f8386
9fe3ef19784356d32026e2078f5b87ce89b18df198df774ec320f190702803f10f5cf1
b78d7e2c5fe9361ac6b9ac78a6ea20b69616f797325cb460f0a91a92703d857da9fb
247c10f197eca7fb7a783bc2be246895b59d22e25f36d24df1cf0b5bbb6dffa4b1ed3
9ee99190413bfa67c6efd907f64cd6e6d6fe1be85aafc43f1744adf63bc95dc436e49c
1512ca1766467e658dce32338639d4fd8bfc65e3afdb13f6c593e2f788ed92cf45f0bd
84b6d6f0db467ecf07988c91c0ac4e4b7ef1e424e7907a0c0a00fd3da28a2800a28a

Hal. 16 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28010aa9ea01fc28c718ed4b45007e377e
dd7fb0b78d3c21f18756f127823c357fe20f0a6bf70f7d1a6936cd33594ac419227445
f917731d9d882064906be5f97e027c4b82e56093c03e26598606c3a54f9c9e9fc3ef5
fd18d2607a5007e487ec5ff00f04d4f12f8b7c4b65e2bf8ada55c787bc3366fe6c5a2d
d662bcbe914fcaae9f7a28f82493863c05033b878cfed1dfb0a7c49f843f13350d3346
f0deabe2ad0266371a7ea7a5d9bccaf1313857d83e475e857b70464104feeb51401f
ce8afecfbf13a4bbfb22fc3ff00131b9c63cbfec9f3ebfdd4afb3bf62dff8267ebbf6b7
6fe2cf8bda43e91a0c51b3dae857126cbb9e5e02b4a983b107cc76b10d955e306bf5
798aa2963c01cd53d135dd3bc4ba55b6a9a4df5bea7a75ca0920bbb495648a45f55
604822803f0a7e3cfec2df143e0ffc45d4344b1f0cea7e2ad1f7196c357d22ca49a29e
124eddc141d8e3a3213c1e85810c7cdadbf67bf8a17f7a6cedfe1ef89e6bacedf2934
99cb64751f76bf7cfc1df1b7c13e3df18f88bc2ba27882caf7c43a04e60bfd3d255f350
8c6580cfcca0b0524676b7ca7078aee703d28b81f96bfb21ff00c12ff52d4f47d4fc47f
15e27d1a5bdd3e5b6d2b471ccf03cb1b27da275ec53702b1e73b87cd8030df26fc51
fd8bfe2d7c33f1c6a9e1f6f066b1acc56b2910ea3a5d949716f7319e55d1d5790411c
7041c82010457ef76adaf69da0adab6a57d6f62b757096901b890279b339c246b9e
ac4f41deaf706803f9eaf067eca3f17bc7fad7a5693f0fb5e370ed8325dd93dbc29eef
2c815147d48afd80fd887f63fb5fd957c11782fae61d4fc5dac6c7d42ee152122551f2
c3193d4025896c0ddc647ca2be95c014b40057cfff00b687ecad67fb557c2e1a3c771
169de26d325375a3ea130fdda48400f149805bcb700676f20aa1e76953f4051401fcf
b78c7f636f8d3e05d627d3b51f875aecaf11c7da2c2d1aea07f75923dcadff81e3bd73
16ff00fe265e4af143e00f134920e4a8d2a7ce07fc06bfa2fa303d28b81fcec7fc3377c
57ff00a275e28ffc154fff00c4d1ff000cddf15ffe89d78a3ff0553fff00135fd13e28c53b8
ac8fe763fe19bbe2bff00d13af147fe0aa7ff00e26a393f679f8a30489149f0f7c4cb24a
708a74a9f2d8ff80d7f4578a303d28b8cfc12f857fb087c68f8a9e21834f8bc17a8e816
8c419754d7607b4b7897382d96197c7f75013ed5fb53f003e08e89fb3d7c2ed23c17
a1e6586d137dcddb2ed6bab8603cc988c9c6e2381938000c9c66b9efda03f6aff01fe
cd9a8f85ad3c617cf0b6bb72620b6e8647b6840e6e1d00cf961b6a9c7cc727686dad
8f54f0e78934af17e8969ac689a8db6aba55da79905e5a4a248e45e990c383c823d
8822901a545145002100f519a0281d001f4a5a2803e35ff82927ec99a9fed0be03d2f
c41e13b3177e30f0ef998b55daaf796ac32f1a9232ceaca0aae467738e4915f93d79f
b3b7c52d3558dcfc3cf13c401da49d2a7e9e9f76bfa2ba4c0f4a00fe7b7c1bfb257c62

Hal. 17 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f1f6a16f69a4fc3bd7d8cce23f3eeac9ede043fedc9205551ee48afd87fd89ff00648b3f
d94be1f5d59dc5d47aa78ab5868e7d52fe2dc230557e586304fdc42d27cd805b764e
3855fa2f18a5a0028a28a003ad7e4e7edc9ff04e6f16d9f8f357f1cfc32d2e4f11685aa
ccd7773a3d9ae6eace66397088399109248da3239047018feb1d1401fcea5ff00ece
df14f4ac8bbf879e2780e76e1f499c1cfa7ddaf41f833fb097c60f8cdafc16b07852fbc3
da611ba6d5b5d81ed6dd17d8b2ee739e30809e79c0e6bf7a703d28e9401f94bfb6af
f00c135eebc11e17f0febf0009b4eb9d6ecb4db38ec354d323532decafb98fdac01f7f
716c32a80570080573b3e2bb9fd9ff00e2769e13ed1f0ffc4d16f3f2eed2a7e71d7f87
dc57f443a4eb9a76bd1dc49a6df5bdfa5bcf25accd6f2ab88e68db6c91b60f0cac082
a7907ad5dc0f4a00fe7607ecdff0015c8047c3af14107a7fc4aa7ff00e268ff00866ef8a
fff0044ebc51ff82a9fff0089afe89f028c53b8ac8fe763fe19bbe2bffd13af147fe0aa7ffe
2686fd9c3e2b22966f875e280a3927fb2a7ffe26bfa27c518145c2c8fe76f4ff00d9b3e
2c6b4c9f61f871e28b9dff77669339cf63fc35fa29ff04f3fd8035bf855e281f11be24d8c
769ad5bc65347d27cd0ef6ecc0879a4da76eeda76aae4e37312010a6bf4430052d2
1851451401c2fc7696f61f829e3c6d32dae2f351fec2bd5b682d63324af2981c20551
c9392381cd79dfec2df08a5f833fb33f84f48bdb5fb1eaf7d11d53508c82ac269b0c03
03c8654f2d48ec54d7bf514005145140075afca2f15fc1e5f875ff00055df0ddbe8f1f93
63ab6a716bf1a291f20915da7180060798b2e0760457ea2f8bfc5da3f80bc33a9788
75fbf8b4cd1f4e85ae2e6ea6276c683d87249e8000492400092057e6e7ec77e23bff
00dac7f6f7f157c5f9ad25b6d1744b375b352a4a44ac9f678236393872864738e0b0
6231d2803f4eebc97f69ff00d9eb49fda67e145f783f53b86b198c82eac6f506e36f72
a182391fc4b866047a135eb545007e037c48fd87fe34fc33d7ae34ebcf026abaac31b
111ea1a3dbb5ddb4cb92032ba038ce33b5b0c3b815c3a7c03f8972dd35b2f803c4a
67fbbb06953e723a8fbbec6bfa31a4c0f4a00fe763fe19bbe2bffd13af147fe0aa7ffe26
8ff866ef8aff00f44ebc51ff0082a9ff00f89afe89f14629dc5647f3b1ff000cddf15ffe89d
78a3ff0553fff001351cdfb3cfc51b52826f87be274321d8b9d2a7e4fa7ddafe8af1460
7a51719fcfe782ff0062df8dbe3dd4e3b2d3be1ceb9017c9fb46a56c6d205c75cc92e
d5cfb6735f7afece9ff000495d07c2f716bacfc56d4a3f13dda8ddfd85605e3b446e71e
64bc3c98c838014647561d7f43e8a40667873c35a4f84345b5d2344d3ad749d32d5
7643696712c71c63393851c724927d4926bc57f6dff008c1e20f831fb3ef88357f0be9
77f7dad5c47f6386eeca069174f0fc35c4857ee0504ed3fdf2b5efb4c96249a368e455
7460432b0c823d08a00fc6cff0082687c5af8ba7e33d8782bc2fa89d43c2b705aef56

Hal. 18 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b1d4f7cb6d6b02fdf9931cc6e4b0518c066281b22bf65abcf7e1b7c01f017c22f10788
b5af08f872d343bed79d1ef4daaed4f941c2c69f7635c9248500127d863d0a800a28
a2800a4201ea334b450020503a003e95f13ffc14bbf646d5fe3df8474cf17783ec96fb
c59e1d8a4496c507efafad09ddb23fef3a1dcc13f8b730196c29fb668a00fe74ef7f678
f8a3a6ab7dabe1ef89e119d9f36953f5f4fbbbed5defc19fd867e2f7c67f10dbd95b7852
ff00c3fa6b65a6d5f5db792d6da351c1e5972cd9e36a827be3009afdeec0f4a3a5007
e53feda5ff04d9baf04f843c33adfc29d3ee75db7d2ec934fd534e8a2696f677dcccdf6b
01461812c430006d0171919dbf14dd7ecfdf13b4f0bf68f87fe268b79f9776953f38ebf
c3ef5fd10693af69bafa5cb69b7f6d7eb6b7125a4e6da559045321daf1b60f0ca7820f
20d5ec0f4a00fe7607ece1f1598023e1d78a083c83fd953ff00f1347fc3377c57ff00a2
75e28ffc154fff00c4d7f44f814629dc5647f3b1ff000cddf15ffe89d78a3ff0553fff00134
1fd9bfe2b2824fc3af1400393ff0012a9ff00f89afe89f14605170b23f9e0d13f662f8b5e
26bb860d3be1d7896769982a93a64a8a39c64b328007a93c0afbd7c03ff049a54fd9
eb5a87c43a8451fc54d56149ed58396b4d30a90c2dc95f5ba3b8c8071b430525ff
0047359d774df0e59addea97d6fa75ab4b1c027b990469e63b0445c9e32ccc147a9
2077a6788bc4361e14d0350d6b54b98ed34db081ee6e279182aa46aa4b124f1d05
219fcf8eabfb30fc5ad0afae6deefe1d78951ed98891974c99978ea410b823be4551b
5fd9efe285f47bedfe1f789a455f9495d2a7e0ff00df35fd027c35f89de18f8bde13b4f1
2784f56b7d6349b91c4b0302636c0251d7aa38c8ca9c1191eb5d4e07a51703f9d8ff
00866ef8aff0044ebc51ff82a9fff0089a3fe19bbe2bfd13af147fe0aa7ffe26bfa27c51
8a771591fcec7fc3377c57ff00a275e28ffc154fff00c4d16ffb38fc55bcbbfb143f0ebc51
2dde37794ba4ce5b1ff7cfb8afe89f14607a51719f8b9f053fe0965f167e24c96f77e28
8e0f00e8cfb599f51fde5db29273b605390463a4853ad7e84fc0cff0082797c20f824b
6f77fd883c59af46013a9ebcab3856c0c94871e5af2320e0b0fef57d3745201154228
5501547000a5a28a0028a28a00f9bbf69efd84be1ffed3b769abea4d73a078a234f2ff
00b634e0a5a6500055951861c281c7208f5c715e1df137f626f871fb2c7ec7ff00156e
e232ebfae5de96239358d45137ab79a9e52c4a07eec6f299e492475ed5fa055f00ff0
0c155be2ec927873c31f06f4291e7d77c4d7915c5e5bde4b0b757c448540e77c9c
e339fdd7bd007b4ffc139b486d23f63ef019910c725d477170ca46386b89029fc5429f
c6be95ae5fe1778353e1dfc37f0bf8611964fec8d36dec9a45180ec91aab363dc827f
1aea28011b853f4af93bf603f85dacf86b4ef895e38f1369377a2ebfe30f12dd5c1b3b
e88c72c70248fb32a795cb3c9c77014f208afaca8a0028a28a006c91acb1b23a8646

Hal. 19 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041523208afca7fd937e127fc2acff829af89fc37a782ba668c97f2c4036ec5bc880c41
8fa812203ee2bf483e35fc61d03e047c36d63c65e23b9586cac2226387761ee6623f
770a0e72cc78e9c0c93c0247c3dff04c0b0d5be2afc5bf8b5f1b75b84c536af31b4876
83e56e965f3a454c9270812251cf0185007e8cb9c231eb815f287fc13dfe13eb3e0cf
08f8e7c5fe27d2ae747f11f8c3c41737935ade23473242923840c8c0143b9a538c72
369ee2beb1a2800af993f6f0fd92e6fdaa3e1c5843a45ea5978a341925b9d384ffea6
e03a81242c7f84b6c421b900ae0f0491f4dd1401fcfcf8b3f62ff8dde0bd4a6b2d43e1b
6bd2345d67b1b537501fa4916e53f81af3fd2fe1578cf5af115fe83a7f85f56bdd6ec06
6eb4eb7b3779e0008077a0195e481c8ef5fd117c47f1e697f0c3c07af78b35a9960d3
348b392ee62cc14b055c845c903731c2a8ee580ef5f1d7fc12ef42bcf15693f12fe2f6
b3183aaf8c75d936b18b6e114991ca9fee97971ff006cfa9dc563f2da0f80df12ae6e
0c317807c4af2b64051a54f938ff80fb55aff00866ef8afff0044ebc51ff82a9fff0089afe
89f03d28c51719fcec7fc3377c57ffa275e28ff00c154ff00fc4d1ff0cddf15ff00e89d78a
3ff000553ff00f135fd13e28c5171591fcea49fb3cfc518244864f87be2659653f229d2a
7cb63fe035dff00c2afd843e347c54f10c1a7c5e0cd47c3f66c419754d7607b4b7897
382d9619723fba809f6afdeccc0f4a5a433cfe00fc12d13f67bf85da4782f42ccb0d9a6
eb8bb65dad7570c0799330c9c6e23a64e00032719af44a28a00e6fe227c3dd03e2a
783b53f0bf89b4f8f53d1b5188c534120fc4329ecca40208e840af8d7c33ff000487f86
1a2f8d9355bff00106b7ace87148248f459ca47bb041db24aa016538c1da14f3c115f
775733f12fe20693f0abc03aef8b75c9d6df4bd22d5eea562c14b607ca8b9e373310a
a3b9603bd007c21f08fc17a4bff00c156bc68fe1fb4b6b2d2b40d1c30b6b38d638e26f
b2c1032855e060b91815fa2b5f9f9ff0004b6d1f51f1e6b9f15be336b71a9bef126a66
da19578fe232ccb8ec016880fa57e81d0015f25fed67f0a751f8cdfb477c02d23fb2ae
66f0ee957979aeea77ad6ecf6a15044c22771c2b3795b477f9f8f6fad28a004030296
8a2800af1afdb0be1858fc5bfd9bfc75a1de461a58f4e92fed24da0b4771029963209
1c64aed2473b59877af65af913fe0a3dfb4de9df057e0cea3e16b2ba825f1878aad9e
ca0b3dd9782d1c324b70c07418ca2e48cb1c8cec61401c3ffc11f2d268be02f89e762
4c326bcc9a9e80ac31e7f98afbcebe67ff008275fc3297e18fecabe168aeaddad6ff005
9326b1711bf5cca47967f189633f8d7d3140057c35ff0558f80dadfc4cf849a778c345
b8b8ba3e126927bad291772b5bb81e64ea00cee4daa4e72368278da73f72d795fed
41f1674ef829f02bc5de29d41ad99a1b2920b4b7ba50e97373202914650fdf0588c8f
ee8627806803f9fcd07c21af789229e5d2346d43548a0c2caf656af2ac64f40c541c6

Hal. 20 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7debbef873fb2bfc58f8afab269fe1ef036b170fbb6bdc5cddb5bdbc5c13f3cb26d45e0
1c64f3dabf4e7fe092de059341fd9ef55f11dd5a9827f116af24b1b90312c11284561e
dbfcd1f857dbe001d062803e3bfd8e3fe09dfe1ff00d9d9e2f12f8a27b7f13f8e4a3289
113759d902307c90ca18b11905ce3862001d4f69fb61fec57e1bfdaa3c3893078b43f
1a58a1163ad08b76e5ebe4cd8e5a327a752849201cb06fa468a00fc03f889fb11fc69
f86dadcba7df780b56d4114feef749b76bbb79064e0878f20138ced3823b8ae25be
02fc4b8ee840de01f1289beec3a54f9c9e83eed7f4654981e9401fcec7fc3377c57ff
00a275e28ffc154fff00c4d1ff000cddf15ffe89d78a3ff0553fff00135fd13e28c53b8ac8f
e763fe19bbe2bff00d13af147fe0aa7ff00e26a39ff0067af8a36281e7f87de278d5885
05b4a9f93e9f77dabfa2bc5181e945c67e07fc28fd85fe32fc56f135be970f83752d02d
5ce66d535cb692d6d615c8c92ccb963cfd504fb57d3dfb61ff00c134aefc17f0e3c31
ab7c2fb6b9f10cba2598b3d5ecd23dd7776c6466374a8b9ddcc84151f75554fcd866
1faa745203f9d0bbfd9fbe2769eabf68f87fe268b79f9776953f38ebfc3ef5dc7c31fd87
fe33fc53d76dac6cfc11aa6936b3105f52d66dded2da2424658bb819c039dab93ed5f
bed81e95e3dfb447ed4be0bfd99a0f0d4be2d9e551addf0b544b75def14406649caf7
442501039f9b80706802ffecd7fb3fe8bfb357c2ad3fc19a34af786376b9bdbf9176b5
e5cb001e52b921410aa02827014724e49f53ac7f08f8c344f1ef876cb5ef0eea96dac
68f7a9e64179692078dc743c8e841c820f20820e08ad8a0028a28a002b87f8ddf0ce
cbe31fc25f157832fd50c3abd8c902349d23971ba293fe0322a37fc06bb8af9c7f6e7f
da634ffd9d7e0cea6f0dd2ff00c25bacc2f67a45a83f3ee61b5e6f6081b703ddb68f5c0
07cd1ff000468b296d34bf8b3bc1d82ef4f881ec5945c67f98afd25af8f3fe096bf0deeb
c13fb3447ac6a107957de26d425d481652aed08c471eecfaec761ecc2bec3a002be
48ff008296fc07d6fe357c036bbd02eee9efbc33336a8da4c4c3cbbd8c2112657bc88
b965e7a6f1825863eb7ae33e327c4cd37e0efc2ff001278cb55755b3d22cde7d8e71
e6c9d238c1f5772aa3dda803f9d8d07c29ae7892499748d22ff005436f8330b2b679
7cb1eadb41c7e35d1695f043e226bbe62e9fe08f10de347cb8874d99b683d33f2fb5
7e9a7fc122bc317371e0ff88de3aba862886bdaba4312c512c6abe586770aaa000b9
980c0000dbc57e818503a002803f9d8ff00866ef8aff0044ebc51ff82a9fff0089a3fe1
9bbe2bfdd13af147fe0aa7ffe26bfa27c518a771591fcec7fc3377c57ff00a275e28ffc15
4fff00c4d469fb3cfc5196e1ad57e1ef898dc280c63feca9f207fdf3ee2bfa2bc5181e94
5c763f19ff0066bff82607c41f89fa9da6a5e3db59fc0de16cef74ba502fa7009f916227
31e71f79c0e0e403d0feaf780be077823e1b7c3b3e07d0fc3d650f86e489a2b9b496

Hal. 21 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25905e6e18733e47ef0b0e0eef181c0000eee8a407e4a7ed5ff00f04b4f12f85755d
43c49f09e1ff8483c3b23194e8018fdb6cf392563cfae41818c1dff301b4e0b57c8179
fb397c54d3039baf877e278421dadbb4a9f83e9f76bfa2aa4c0f4a00fe79fc23fb2a7c5
ef1cdfc167a4fc3bf10c8f23888cb3d8490c4849eae02a8e7a935faeffb08fec791fe
cb7e05b9b8d65e0bcf1beb386d42780964b78c7dcb743df1c9638e58e0642827ea1
c6296800a28a2803e50ff008291fc02d47e38fc00965d06d0def883c3971fda76f6f1a
ee92788291346833f7b6e1b1c93b30012457e44fc15fda1fe207ecebafcd8782f5c9
b4a925c2dd59caa24b79c0cf1244d9048c9c1c6464e08afe8908cd7c7ffb457fc1333
e1b7c6ed5ae35ed16593c09e21b8da66934c811ace623ab35bfca03918c956519c9
20924900f94b4dff0082c7fc4486d765f7827c37753818f36169e207dca976fe62b9df
17ff00c15cfe316bd6325be91a6f877c34ec7e5bab5b479a651ff6d5d90fdf35d5ea3ff
00046cf1ca5eb2d878f3409ad377caf710cd1c98f750ac3f5aeefe1fff00c11af4eb7b9
827f1a78fe7bc854fef6cf45b41116e3b4b216c73fec53d05a9f0fd84df17bf6d1f89769
a64fa86b1e33d6a66ddfb66682ce32c033ed184863048c9f94722bf6dbf668f809a4
fece3f09347f07e9a44f711279da85ee066e6e980f31fa0f973c283c850b9c9c93adf0
77e057823e02f86ffb17c13a15be916cfb4dc4cbf34f72c33869643f331e4e01381938
00715df521851451400846457e497edb1ff04def17e87e39d57c63f0c34993c47e1a
d4e56ba9748b25dd77612b1f991631cc91924952b9206430e0337eb751401fce95f
7ecf1f1474be2ebe1ef89e024edc36933f5f4fbb5a9a1feca7f18bc4b2c0ba7fc35f134
cb3300b2369b2a20cf76660028f72457f43181e9463145c0fc95f809ff000491f17f88e
fadeffe286a317863470d97d374f9966bd9578fe200c7183ebf311dd6bf4f3e167c27f
0afc16f07db7863c1da443a3e9103193ca8f2cd2487ef3bb9259d8e00c9278000c00
00ebe8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a00f99bfe0a19aefc40d1bf66cd7a2f0069173a8cd7a0c1aa5cda0dd2
d9d8907ce7541c9c8f94900ed52e4e3191f9affb0bf8d7e3d5cf8875df03fc26d50186
e74dbab8b8b4d4dc9b5b66f28aacc84ffab97798d5586016d9bf2a0e3f7008c8c1ae3
fc11f083c21f0df5cf116ade1ad0ad346bdd7e64b8d41ad220825745da0e074ea4e0
7192c7a924807e1afc26f823f15bfe1a7348f04d9c7aaf84bc782fb335d92d0cb6883e
692e370232a132d904ee18c67233fbe3a5da4b61a6da5b4d772dfcd0c491bdd4e14
49330001760a02e4f53b40193c0038a89b42d39b5b4d64d85b9d592ddad16f8c43c
e5859833461f19da595491d3201ed57e803f22bfe0acff11fc73aafc55d2bc377da4ea
1a2782f4b4f374c9df88b519c85324e19783b721002495193852e457d5fff0004c6f1

Hal. 22 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3fc54f197c129b55f1f6a8da9e8266f23409af14b5e3c4848919a43f7a30df2a9393f2
b0c80a057d3bf12be18f867e2f784aefc37e2cd26df58d26e47cd14eb931b6080e8dd
51c64e1872327d6b67c3fa158f85f43b0d1f4cb78ed34eb1812dade08942ac71a285
5000c01c0ed401a14514500145145001451450014514500145145007e50ff00c14e
7f65af89fa8fc42bef8a30cb278b3c2af12c3e55aa1f3347890708d1e4feec9dcdbd78
c962c14919fb13fe09fbfb3adf7ecf5f02ed6df5b96e4788b5d75d4afece595fcb3257
09108c9c2b05c6f200258e092116be99650c0820107b1a5a0028a28a0028a28a002
8a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bc73f6b8f1e78c7e1cfc04f146b1e04d0eef5
bf11880c509b340ed66adc35c94c82de58e70a1b07048da188f63a4eb401f851fb0bf
8c3e2ec1fb40693a37c3ad5a686eb55ba0faadbde832d93c0a4b4b25c4648c8552fc
821f2d8520915fbac8085018e5b1c9f535c4784be08f823c0be3bf10f8c741f0ed9699
e20d7d234bfbab78950c814927000f94b13b9f18de554b648cd7734005145140051
45140051451400514514005145781fed09a87ed09e1fd4a2d5fe1559f8535ed1a088
89744d4d245bb958e32e1f7aa9030d85041e7a31e801ef95cf78f3e207877e18f85ef
7c45e29d5edb44d1acd0bcd7574f8038fbaa3ab31e8154124f00135f9a5f11bfe0a4ff
00b45f81de5d3359f859a6f863502a57cddb36ef20f4dc9ba4da7f515f2eeb327ed0
3fb68f8aa26bcb5f10f8c675701112dda3b1b4ce067002c510e064f19ef401e85fb63f
edc5e23fdabf5d8fc1de10b5bcd3fc146e156df4e8c1373a9480fc8d28527bf2231900
e09c9008fd28fd87bf6695fd9a3e0c5ae957d1a7fc253aa30bed5e452ac564230b0ee
5e0841c7523717c1208af30fd877fe09ed6bfb3cdd47e31f19cb6dabf8e8a116d1db3
17b7d3959486da481ba4209527181ce339cd7dab40051451400514514005145140
05145140051451400514514005145140051451400514514005145140057917ed5d
e3af17fc3af811e27d67c0ba15debb25580c56eb668b235a86e1ae4a1396118c9c2
8639c12368623d768a00fc22fd88fc69f17adff00683d274af875ab4d1ea5abde06d5
2def73259cb0a92d2bdcc79190aa5ce410fc9da43115fbb510658d03b07700066030
09ee715c5785fe09f827c17e3fd7bc69a1f87acb4cf116b912457f776f12a9942b1627
a7ca58905b6e379552d9201aee2800a28a2800a28a2803f2ff00fe0afbe20f88735ff8
674a1a45d5a7c37b62274d4a125a2b9be21b890838428b90a180272e4123a78ef8
49bf699f8ff00b1ceb1a5698f71e25f026997f0c3e53b17d4ae228d598c51779628db
ca254e483e585c8560bfb21e23f0de97e2ed12f347d6f4fb6d574bbc4f2ee2d2ee312
4722fa153c1e707ea0551f01781343f865e10d33c31e1bb08f4dd134d8bc9b6b5887
08b924e4f72492493c924924924d007e517fc127fe1c78e757f8bfa96bf63ab6a3a17

Hal. 23 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83f4840baac311db1ea1310c22b7656e0e396271950300a9606bf5f6a8695a0e9ba
11bd3a7585bd89bdb86bbb936f184f3a6600348f8eac428c93cf02afd00145145001
45145001451450014515e6df1d3e37d9fc08f0cc1af6a3e1dd7b5ed3bcc22e9f43b3f
b41b48c0c9924e4055e9d48cf3f4201e93457cc969ff000524fd9eae2cd2697c766ce
42b96b69f4bbbf310ff0074811119fa1af0ef8d3ff057cf08e8b637365f0d740bcf106a9
9291ea3ab27d9ecd3d1c203e6483af0767d7b5007d75fb467ed09e1bfd9b7e1c5ef8
a7c412892500c561a7238596f6e31958d7ae07766c1da39c13807f3b3f60ff046bdfb
5a7ed4badf6af1aa35c5ae8d70b78adc88cddf4b7893273b6355c80338d8a0f515f3
ae85a57c5cfdbfbe35c71dcddcfad6a739067bb9b2965a65b0232700623419e80649
3dc9e7f6b7e02fc14d0bf67ef861a47833408d4dbd9a6eb8baf2c23ddcedfeb267ebc
93d01270028c9c0a00f42a28a2800a28af98be3d5c7ed3fe0ff155ef883e1b37863c5f
e1868c6cf0ddda98ae60dbbb243ef53292369e1873c0418cb007d3b5e79f1bbe3d7
82ff0067cf07cde21f196aa9636e037d9ed23c35cde3819f2e18f2373723d00c82c40
e6bf387e297fc1423f6a6d0e06d36fbe1f5bf81ef5ba5cae857064f4f97ce6743f91af9
ef4bf80ffb437ed6de2e1ac5fe8be21d76e6e7aeb1ae0682da34cf215e5da81464e11
3f014017be33fc73f885fb7d7c6bd2346b1b39a1b4b8b95b4d2340b77678ad519b06
590f00b60e5e4200c0ecaa00fd8dfd9d3e0ae9ffb3f7c20d03c17605656b28b7dddca
8ff5f70dcc8fd0719e064676819af34fd8dff628f0efecb1e1b3713341ae78e2f500bed
64210b1a903304209e101cfcd80cdd4e3851f4ad0014557d46edac34fb9b94b79af1
e189a416f6e019252013b57240dc7a0c90327a8af966cff00e0a43f0cb48d6ef742f1f
587887e1b6b966e564b4d734d760467e52a620c4e5769e40ebc13d6803eaea8e7b
88ad609269a458618d4bbcb8ec02aa8e4924f415f20f8dbfe0aa5f02fc2f6ccda5ea3ab
78aae3076c5a669ef18ce38dcd379781ee33d7a1af81ff699ff0082837c44fda6cbf86
346b56f0b7856e64545d1f4d7692e6f0f002cd2800b8ce48450abc8c862a0d007adfe
dc9fb52ea9fb537c43d3be07fc2a69753d19f50582e67b170c9aad29e30c0e0c11e
0b673b495dc785523f493e067c2bb2f827f097c31e0ab021e2d22d1627957389252
4bcae33c80cece40ed9c57c9dff0004e6fd87a7f82fa727c44f1c59ac7e33d4201f60b
09508934b85d486df9e92bab60ae328320f2485fbb2800a28a2800a28a2800a28a4
3c5002d15f315c7fc143be14f873c4ba9e81e34feddf016a9633b4462d77499544aa0
fcae9e587382369e40fbddc73583e39ff0082a57c08f09d8f9ba5eb1a8f8b2e581db6f
a569f221071c6e69c4600cf719fa5007d7324890c6ceec111465998e001eb5f929fb7
dfed5371fb4d7c41d23e0e7c3695f52d123d452de59ed482baade121102f4ca212c0

Hal. 24 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070c4e79014d796fed37ff0512f889fb45452e83a62b783bc273128da5e9b3334f76
08c6d9e6182e0e4fc802a9e320900d7d7ff00f04e1fd862f3e14ac1f13bc7b686dfc53
75011a668f32e1f4f89c7324be92b29236ff08639f9890a01f5dfecf9f082cbe04fc1ef0
d782eccac874eb502e675ff0096d70df34af9c0382e4e33c850a3b57a2d145001451
557555bd7d32ed74d7822d40c2e2d9ee90bc4b2e0ec2eaa412b9c64020919e4500
5aa2be1bf89df1bbf6bef829239bbf877e18f1fe96092ba9787adae656c75f9a3570cb
b47049400f626be4af8a3ff00052afda07c6d6b368f656107824b86865fec7d3e55ba
39c8c0794bb237ba6d2302803f41bf6b7fdb7fc1ff00b30e8f3d8f989aef8de7849b3d
160707ca623e592e083944ef8fbcddc6300ee1f9a5fb397c31f19fede7fb481d77c5b77
75a8e996f34777adea2fc2c70a91b6043c052c06d50b9c75c601aabf023f604f8b9fb
4378862d4358d3ef3c2fa0dc49e6dd6bdae44caee09cb18e3621e563ce3a2e7ab0af
d8cf821f053c31f007e1ed87847c2b64b6b636e3cc9e539325d4e54079a4249cb36d
1ec0000600000077169690d85ac36d6f12416f0a08e38a350aa8a060000740076a9
abe7bf8b5fb72fc34f827e36b9f0d78ac6bd6371044b29bd5d2656b593248c23e3e6c
118240db9e339071e23e3cfff82befc30d16ca41e17f0f6bbe24be1c28b844b383ea5c
966fc365007dc5afebda7785b45bdd5f56bc8b4fd36ca269ee2ea76da91a28c9627e
95f8dbfb62fed2dac7edb3f19b44f01f80d2eaeabc2905e8b5d2ad51761bfb863b4dcb
a9c60632177636ae49da59abce3e3cfed7df15ff6b7d62d346bc77874e9a558ed7c3
3a0a48219642405dcb92d2b93d371382780335f7cfff00c13bff006129fe0bc71fc43f1
e5ab43e349e364b1d31f691a744c305d882732b29231c6d0482093f2807d7bf06fe1
ad87c1ef85be19f06e9ca05b68f6496e5973fbc93ac8fcff79cb37fc0abb3a28a0028a
28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a002bf2e3fe0a87fb2d7c4cf12f8d6e3e2
869d349e29f0adbd9242d636f1feff4889012ff0020fbf19259cb8e465b7000027f51e9
080c082320f63401f27ffc1393f673d4be04fc1086f35f96ee3d7fc46cba84da74d2308
ec632a3cb4f2c9c2c84619ce01e5548f92beb1a45508a1540007000ed4d9b7f94fe5
6df3369dbbfa67b66801f457c55f14be29fed7bf0627bfba4f05f853e23e82256923bc
d1ade713451966da86112871b57193b580fef1e4d7c95f13ffe0a69fb416bb6d71a2d
b68767e07ba24c72bd8e9b2fda97230573316da7dc0047622803f44bf6a0fdb17c0ff
b30680f26ad729ab789a54dd67e1eb5980b89bd19ce0f969fed11f406bf2a7c09a37
c42ff00828bfed331cfaf5db491b113dec9192b6fa5e9eb20cc70a92700799855ce58
b649c92d54be14fec6bf1bbf69ef147f6bdf697aa5b5a5ec9e6ddf897c4a5d15c31397
0d27cf29c823e40d8246715fb07fb367ecdfe17fd993e1dc1e18f0ea1b8b87226d475

Hal. 25 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59d409afa7c60bb63eea8e8a83851dc92ccc01e8fe1ed02c7c2ba0e9da369902dae
9da7dbc76b6d0af448d142a8fc0015a35e17f1abf6c9f87bf007c510e87e2e5d72de4
922f34dedbe952c96abc03b7ccc618e08276e40ce09078af0af1bff00c15e3e136876
53ff00c23ba36bfe24bf5ff571bc296903fd64662c3fef83401f725d5d43636d2dc5c4a
905bc48649259582aa28192493c00077afc7afdbd7f6c3bdfda7fc6761f0cbe1e89ee
bc2705e8854411969758bcde511942e498c71b140c92d9233b42f997ed1dfb767c4
efda7e59342323685e189e4023f0f6905bf7ff36544cff7a63900e0e172010a0d7d85ff
0004eefd812e7c0b7365f137e2469f25b78810f99a4689751ed6b3f49a653c897fbaa
47cbc1ebc2807d87fb31fc1f8be04fc0df09f83c205bcb3b457be6dc1b75d3fcf372060
80c4a83e8a2bd4a8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2
800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28010aab7500fd450142f4007d29
68a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0
028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0029080460f34b45007cf3f187f60af831f1a6
eee6ff0056f0b8d2b57b8397d4b4493ecb296ce4b1500c6cc4939250939e6bc974ff0
0f8244fc1ab4bf49ae354f145e408c1becf7b12ab8f462b10383ec41afb828a00e3be
187c1ff00067c19d01746f05f876cbc3f61c6f5b58ff792919c1924397908c9e589233
8aec68a2800a28a2800a28a28010a83d40340007418a5a2800a28a2800ae23e29f
c14f047c6ad1d74cf1a7872cb5eb6407ca6b84c4b0e719d920c32e70338233819e9
5dbd1401f116abff00048cf8317d7cf3db6a3e27b089dcb1b78af626451e8a5a2247e
24d7b37c07fd8a3e14fecef74ba8786b426bbd754155d6756905c5d203c108701538
246514120904915eef45001451450014514500145145001451450071bf12be0ef82
be30e90da6f8cbc35a7f882db69543770832440f5f2e418643eea41af95b5cff00824
87c17d4efe5b8b3bef12e951c8dbbecd05ec6f1a0f45df196fcc9afb6e8a00f9cfe08fe
c09f07fe04eab06afa468936b3ae5bb8920d4b5c985c490b0e41450151482010db7
208041afa328a2800a28a2800a28a2800a61890904a292391c53e8a004c62968a2
8033f5bf0fe97e25b092c757d36d354b29061edaf6059a361eeac0835e21e22fd823
e01f8a35092f6f7e1be9a9712125bec734d6a9ff7c44eaa3f2af7fa2803ccfe177ecd5f

Hal. 26 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0c3e0bcad37837c19a668b7473fe96b1996e00230409642ce01c0c80706bd328a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800
a6f96a7f847e54ea280100c74a5a28a00a9a9e9565ad594b67a859c17d693294920
b989648dd4f50548208af11f157ec27f01fc65a835eea3f0df4a4b86e09b0696cd7fef
885d17f4af79a2803ca7e18fecaff09fe0e5f0bef08f81f4cd2afc1cade32b4f3a1c11f2c
929665e091c11d6bd5a8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a
28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28
a2800a28a2800a28a2800a28a2803ffd9

Hal. 27 dari 27 Penetapan No. 529/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)